

SISTEM MANAJEMEN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DIPENGARUHI OLEH POLITIK

Sri Sudiarti, Kasful Anwar US, Ahmad Syukri Shaleh

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: ssudiarti90@gmail.com

ABSTRACT

This article aims to see the extent to which the education management system is influenced by politics. The method used is library research. The results of this study found that the state's response to the needs of Muslims by including Islamic education institutions both at the madrasah level up to the level of Islamic higher education as the same education as public schools and general higher education in the national education system is the government's effort in promoting Islamic education in Indonesia. It must be realized that the policies taken towards education should not be intervened by politics and pressure from any party. So that the policy can produce rules that are oriented towards educational goals and give birth to a good generation.

Keywords: *educational institutions, management, politics*

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk melihat sejauh mana sistem manajemen pendidikan dipengaruhi oleh politik. Metode yang digunakan adalah penelitian pustaka. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa respons negara terhadap kebutuhan umat Islam dengan memasukkan lembaga pendidikan Islam baik pada tingkat madrasah sampai pada tingkat pendidikan tinggi Islam sebagai pendidikan yang sama dengan sekolah umum dan pendidikan tinggi umum dalam sistem pendidikan nasional merupakan upaya pemerintah dalam memajukan pendidikan umat Islam di Indonesia. Perlu disadari bahwa kebijakan yang diambil terhadap pendidikan seharusnya tidak diintervensi oleh politik dan tekanan pihak manapun. Sehingga kebijakan tersebut dapat menghasilkan sebuah aturan yang berorientasi pada tujuan pendidikan serta melahirkan generasi yang baik.

Kata kunci: *lembaga pendidikan, manajemen, politik*

PENDAHULUAN

Relasi pendidikan dengan kebijakan politik dapat dikatakan sebagai sebuah relasi yang sama-sama mempunyai imbas pada kedua pihak, baik imbas dalam artian yang positif ataupun dalam bentuk imbas yang negative. Setelah Indonesia merdeka

pemerintah menetapkan sejumlah kebijakan politik pendidikan yang secara fungsional umat Islam mendapatkan manfaat atas kebijakan politik pendidikan pemerintah, terutama bagi pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan Islam. Atas dasar ini lahir berbagai kebijakan negara tentang sistem pendidikan nasional yang memuat tentang relasi antara pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional, di antaranya lahir Undang-Undang Nomor 4 tahun 1950 Jo. Nomor 12 tahun 1954 tentang Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, Undang- Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Undang-undang tersebut posisi pendidikan Islam mengalami perubahan sesuai dengan pengaruh kepentingan oleh pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan kebijakan negara tentang sistem pendidikan nasional.

PENGERTIAN MANAJEMEN

Beberapa ahli di bidang ilmu manajemen menjelaskan apa arti manajemen. Pendapat para ahli ini bisa kita jadikan sebagai landasan untuk lebih memahami tentang ilmu manajemen. Berikut adalah definisi manajemen menurut para ahli:¹

a. Mary Parker Follet

Menurut Mary Parker Follet, pengertian manajemen adalah sebuah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Dengan kata lain, seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan sebuah organisasi.

b. George R. Terry

Menurut George Robert Terry, pengertian manajemen adalah sebuah proses yang khas yang terdiri dari beberapa tindakan; perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan. Semua itu dilakukan untuk menentukan dan mencapai target atau sasaran yang ingin dicapai dengan memanfaatkan semua sumber daya, termasuk sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

c. Ricky W. Griffin

Menurut Ricky W. Griffin, pengertian manajemen adalah sebuah proses perencanaan, proses organisasi, proses koordinasi, dan proses kontrol terhadap sumber daya untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien.

¹[https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/pengertian-manajemen./](https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/pengertian-manajemen/) diakses pada tanggal 19 maret 2019 13:21 wib

SISTEM-SISTEM MANAJEMEN

1. Manajemen Bapak diartikan bahwa setiap usaha dan aktivitas organisasi para bawahan selalu mengikuti jejak bapak atau atasan. Kebaikan dari manajemen ini adalah apabila pemimpin tetap pada proporsi yang benar, pekerjaan dapat dengan cepat dikerjakan sehingga tujuan tercapai dengan baik. Kelemahannya adalah apabila pemimpin tidak benar, perusahaan akan hancur karena bawahannya akan turut menyelewang. Kemudian organisasi terbatas, sebab hanya tergantung kepada kecakapan pemimpin, bawahan hanya merupakan robot saja.
2. Manajemen Tertutup diartikan bahwa pada manajemen ini pimpinan tidak memberitahukan atau menginformasikan keadaan perusahaan kepada para bawahannya walaupun dalam batas-batas tertentu. Kebaikan dari manajemen ini keadaan dan kerahasiaan dari perusahaan akan terjamin, pengambilan keputusan cepat, kerna tidak melibatkan partisipasi bawahan dalam proses pengambilan keputusan. Kelemahannya adalah para bawahan tidak mengetahui keadaan perusahaan apabila untung atau rugi, problem dan pemecahan masalah yang dihadapi perusahaan hanya dihadapi manajer saja, tidak mempersiapkan kader-kader pengganti di masa depan.
3. Manajemen Terbuka dapat diterapkan dengan cara sebagai berikut : manajer banyak menginformasikan keadaan perusahaan kepada bawahannya, sehingga bawahan dalam batas-batas tertentu mengetahui keadaan perusahaan. Yang kedua seorang manajer sebelum mengambil keputusan, terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengemukakan saran-saran dan pendapat nya. Sehingga manajer mengajak para bawahannya untuk ikut berpartisipasi dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Kebaikannya para bawahan akan terbina dan terlatih, sehingga memunculkan kader-kader untuk masa datang, menciptakan suasana kerja sama yang akan semakin baik, menimbulkan perasaan senasib dan sepejuangan, dan para bawahan mengetahui arah yang diambil perusahaan. Kelemahannya pengambilan keputusan lama, rahasia perusahaan tidak terjamin, kecakapan dan kewibawaan atasan akan diketahui para bawahan sehingga wibawanya berkurang.
4. Manajemen Demokrasi, pelaksanaannya hampir sama dengan manajemen terbuka hanya pada manajemen demokrasi hanya dapat dilaksanakandalam suatu organisasi yang setiap anggotanya mempunyai

hak suara yang sama, kemudian dalam manajemen demokrasi setiap anggota ikut menetapkan keputusan berdasarkan suara terbanyak².

MODEL MANAJEMEN YANG TEPAT UNTUK MENGEMBANGKAN PENDIDIKAN ISLAM

Sejak dekade 90-an, kesadaran umat untuk meningkatkan mutu lembaga pendidikan Islam mulai bangkit dimana-mana dan beberapa di antaranya telah mampu menjadi sekolah unggul atau sekolah yang efektif (effective school). Yang menjadi persoalan adalah model manajemen yang bagaimana yang tepat bagi pendidikan Islam yang memiliki karakteristik tersebut?

1. Manajemen yang Bernuansa Entrepreneurship.

Sebagaimana dikemukakan di muka bahwa sebagian besar pendidikan Islam tumbuh dan berkembang dari bawah dan dari kecil. Manajemen yang tepat adalah manajemen yang dapat memberikan nilai tambah. Manajemen yang dapat memberi nilai tambah adalah manajemen yang bernuansa entrepreneurship. Rhenald Kasali dalam "Paulus Winarto menegaskan bahwa seorang entrepreneur adalah seorang yang menyukai perubahan, melakukan berbagai temuan yang membedakan dirinya dengan orang lain"[5][6], menciptakan nilai tambah, memberikan manfaat bagi dirinya dan orang lain, karyanya dibangun berkelanjutan (bukan ledakan sesaat) dan dilembagakan agar kelak dapat bekerja dengan efektif di tangan orang lain. Seorang manajer yang sekaligus sebagai seorang entrepreneur memiliki karakter sebagai berikut: memiliki keberanian mengambil resiko, menyukai tantangan, punya daya tahan yang tinggi punya visi jauh ke depan dan selalu berusaha memberikan yang terbaik. Menjadi seorang entrepreneur diperlukan integritas yang kokoh, memiliki etos kerja yang tinggi dan kesanggupan untuk menghadapi tantangan, hambatan dan bahkan ancaman. Seorang entrepreneur adalah orang yang berani mengambil keputusan "keluar dari zona nyaman dan masuk ke dalam zona ketidakpastian (penuh resiko)". Manajer yang biasa (konvensional) sebenarnya adalah orang yang paling membutuhkan keamanan dan status quo, dan sebaliknya takut pada perubahan. Hal ini wajar karena ia sedang berada di puncak piramida dalam struktur organisasi dengan segala fasilitas, kedudukan dan kehormatan yang melekat padanya.

Seorang entrepreneur pada dasarnya adalah seorang pembaharu (innovator) karena melakukan sesuatu yang baru, dianggap baru atau berbeda dari kondisi sebelumnya. Apa yang dilakukan itu membawa perubahan ke arah yang lebih baik

²Syafaruddin. *Manajemen lembaga pendidikan Islam*. (Ciputat : Penerbit Ciputat press, 2005), hal. 30.

dan memberi nilai tambah bagi diri maupun orang lain. Dalam upaya untuk menciptakan nilai tambah seorang entrepreneur sangat mengutamakan kekuatan brand, yaitu citra atau merek yang kuat atas apa yang dilakukannya. Dengan brand yang baik jelas akan memberikan value yang tinggi. Brand image bagi sebuah lembaga pendidikan merupakan aset yang paling berharga yang mampu menciptakan value bagi stakeholder dengan meningkatkan kepuasan dan menghargai kualitas dan akhirnya melahirkan kepercayaan. Seorang manajer yang sekaligus entrepreneur bukan sekedar bisa membangun brand belaka, namun juga memanfaatkan kekuatan brand untuk melipatgandakan akselerasi sebuah perubahan.

Pesan Kyai Dahlan (KH. Ahmad Dahlan) agar meng”hidup-hidupi Muhammadiyah dan jangan mencari hidup di Muhammadiyah” dapat ditafsirkan dalam konteks semangat entrepreneurship. Artinya setiap orang yang bekerja di lembaga amal usaha Muhammadiyah harus mampu memberikan nilai tambah bagi perkembangan lembaganya. Dengan cara inilah akan terjadi penumpukan capital (capital development) sehingga amal usaha Muhammadiyah dapat terus tumbuh dan berkembang.

PENGERTIAN PENDIDIKAN ISLAM

Sebelum kita memasuki tentang lembaga pendidikan islam, kita harus mengetahui tentang pendidikan islam terlebih dahulu dan tujuan pendidikan islam. Dan Dari pendidikan islam itu maka terbentuklah lembaga dalam dalam pendidikan islam.

Dalam surat shod ayat 29:

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ {29}

Artinya :”ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan keberkahan supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya, dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran

Pendidikan secara umum dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang bermakna sebagai usaha untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi bawaan, baik jasmani maupun rohani, sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan.³ Sedangkan dalam bahasa Arab “pendidikan” terkadang di sebut al-ta’lim yang biasa diterjemahkan dengan “pengajaran”. Terkadang juga di sebut al

³ Sidik, Firman. "Pendidikan Humanis dan Implikasinya Dalam Pembelajaran." *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4.1 (2016): 88-95.

ta'dib yang berarti perjamuan makan atau pendidikan sopan santun, atau pendidikan akhlak⁴. Selain kedua kata di atas “pendidikan” juga disebut al tarbiyah. Dalam Kamus (mu'jam) kebahasaan kata al tarbiyah memiliki 3 arti :

- Raba-yarbu : Memiliki arti tambah (zada) dan berkembang(nama-yanmu). Pengertian ini didasarkan atas Q. S. Al Rum, ayat: 39.
- Rabiya-yarba-tarbiyah: memiliki arti tumbuh (nasya'a), dan menjadi besar.
- Rabba-yurabbi-tarbiyah: Memiliki arti memperbaiki (ashlaha), memelihara, merawat, memperindah, memberi makan, mengasuh, memiliki, mengatur, menjaga kelestarian dan eksistensinya⁵.

Musthafa al Maraghiy membagi kegiatan al tarbiyah dengan 2 macam. Pertama, tarbiyah khalqiyah, yaitu penciptaan, pembinaan, pengembangan jasmani peserta didik agar dapat dijadikan sebagai sarana bagi pengembangan jiwanya. Kedua, *tarbiyat diniyat tahdzibiyat*, yaitu pembinaan jiwa manusia dan kesempurnaannya melalui petunjuk wahyu Ilahi⁶. Chabib Thoha, membagi definisi pendidikan menjadi 2 pengertian⁷ Pertama, pengertian yang bersifat teoritik filosofis. Yaitu pemikiran manusia terhadap masalah-masalah kependidikan untuk memecahkan dan menyusun teori-teori baru dengan mendasarkan kepada pemikiran normatif, spekulatif, rasional empirik, rasional filosofik maupun historik filosofik. Kedua, pengertian pendidikan dalam arti praktis. Yaitu suatu proses pemindahan pengetahuan ataupun pengembangan potensi-potensi yang dimiliki subyek didik untuk mencapai perkembangan secara optimal. Singkatnya, ia berarti pendidikan yang berlandaskan kepada nilai-nilai yang baik dan mengandung kepastian, bukan nilai-nilai yang relatif, tetapi nilai-nilai yang universal. Dari sini, “pendidikan Islam” dapat didefinisikan sebagai pendidikan yang falsafah, dasar dan tujuan serta teori-teori yang dibangun untuk melaksanakan praktek pendidikan didasarkan nilai-nilai dasar Islam yang terkandung dalam Al Quran dan Hadist Nabi.⁸

⁴Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum PP. Krapyak, 1999), hal. 64.

⁵Ibnu Mandzur, *Lisan al Arab* (Bairut: Dar al ahya', tt), hal. 94-96, Jilid V 102

⁶Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia 2002), hal. 3.

⁷Chabib Thoha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1996), hal. 98-99.

⁸ *Ibid.*, hal. 99

LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

Secara garis besar, ada tiga macam bentuk lembaga pendidikan Islam, yaitu: lembaga pendidikan informal, lembaga pendidikan nonformal, lembaga pendidikan formal⁹.

1. Lembaga Pendidikan Informal

Maksud dari lembaga informal ini adalah pendidikan keluarga. Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama bagi anak-anak. Di dalam keluarga inilah tempat meletakkan dasar-dasar kepribadian anak didik pada usia dini, karena pada usia ini, anak lebih peka terhadap pengaruh dari pendidikan orang tuanya atau anggota keluarga lainnya.

2. Lembaga Pendidikan Nonformal

Maksudnya adalah lembaga pendidikan yang ada di masyarakat, baik berupa pengajian-pengajian, majelis taklim atau yang lainnya. Majelis taklim misalnya, ia adalah lembaga pendidikan yang ada di masyarakat yang tumbuh dan berkembang dari kalangan masyarakat Islam itu sendiri, yang kepentingannya untuk kemaslahatan umat manusia. Maka, majelis taklim adalah lembaga swadaya masyarakat yang keberadaannya didasarkan pada keinginan untuk membangun masyarakat yang madani.

3. Lembaga Pendidikan Formal atau Sekolah

Sekolah adalah lembaga pendidikan yang penting setelah keluarga. Semakin besar kebutuhan anak dan semakin besar kehidupan keluarga, orang tua biasanya menyerahkan tanggung jawab pendidikannya kepada lembaga sekolah. Sekolah di sini berfungsi sebagai pembantu lembaga keluarga dalam mendidik anak. Tugas guru dan pemimpin sekolah, di samping memberikan ilmu pengetahuan dan keterampilan, juga memberikan bimbingan yang sesuai dengan tuntutan agama.

PENGARUH POLITIK TERHADAP SISTEM MANAJEMEN DAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

Pengaruh politik kepada pendidikan Islam itu berkembang dengan seiringnya waktu, dari zaman belanda hingga saat ini. Yaitu sebagai mana penjelasan di bawah.

1. Pengaruh politik pada zaman Belanda

Sebelum kedatangan bangsa Eropa -termasuk Belanda- pendidikan Islam sudah ada dan mulai berkembang ke seluruh pelosok tanah air. Walaupun pelaksanaannya masih sangat sederhana jika dibandingkan dengan perkembangan setelah kedatangan bangsa Belanda. Pendidikan Islam berjalan dan berkembang seiring dengan dakwah dan penyebaran Islam itu sendiri, baik dikalangan masyarakat maupun istana raja-

⁹ Munir Toto Suharto dkk., *Rekonstruksi dan Modernisasi ...*, hal.102-105

raja. Pendidikan Islam pada saat itu mengambil bentuk halaqah, dan tatap muka perorangan di mushalla, masjid, maupun pesantren. Ketika Belanda datang, pendidikan Islam mulai mengalami hambatan. Rintangan dan tantangan untuk berkembang lebih maju seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman itu terutama ketika dihadapkan dengan persaingan melawan kristenisasi yang justru dilakukan oleh kaum penjajah mulai dari bangsa Portugis hingga Belanda. Belanda membuat berbagai peraturan dan kebijakan yang intinya menghambat dan menghalangi perkembangan dan kemajuan pendidikan Islam. Belanda membawa dan menyebarkan misi Kristen sekaligus menguasai bumi nusantara. Motivasi ini sering dikenal dengan istilah “Tiga G” (Gold, Gospel, dan Glory). Gold (emas) yang berkaitan dengan ekonomi. Gospel (Injil, kitab suci) yakni berkaitan dengan misi penyebaran agama Kristiani, dan Glory (kejayaan) yakni berkaitan dengan politik atau kekuasaan. Kebenaran misi ini dapat terlihat di hak octroi VOC yang berbunyi: “Badan ini harus berniaga di Indonesia dan bila perlu boleh berperang. Dan harus memperhatikan perbaikan agama Kristen dengan mendirikan sekolah.” Sehubungan dengan octroi ini Gubernur Van den Capellen tahun 1819 M merencanakan berdirinya sekolah dasar untuk pribumi agar dapat membantu Belanda. Dalam surat edarannya kepada bupati yang menyatakan bahwa “Dianggap penting untuk secepat mungkin mengadakan peraturan pemerintah yang menjamin meratanya kemampuan membaca dan menulis bagi penduduk pribumi agar mereka lebih mudah untuk dapat menaati undang-undang dan hukum negara.”

Menurut Deliar Noer dan H. Maksum yang dikutip oleh Rasi'in dalam Abuddin Nata, bahwa latar belakang lahirnya ordonansi-ordonansi ini sepenuhnya bersifat politis untuk menekan sedemikian rupa, sehingga pendidikan agama tidak menjadi faktor pemicu perlawanan rakyat terhadap penjajah. Pengalaman penjajah yang direpotkan oleh perlawanan rakyat di Cilegon tahun 1888 merupakan pelajaran serius bagi pemerintah Hindia Belanda untuk menerbitkan ordonansi. Dengan demikian sebagai penjajah, Belanda telah melakukan diskriminasi terhadap bangsa pribumi, baik secara sosial, ras, politik, maupun agama. Perlakuan diskriminatif pemerintahan Belanda tersebut tidak membuat rakyat Indonesia tinggal diam. Menurut H. Aqib Suminto yang dikutip oleh Rasi'in dalam Abuddin Nata, pesantren (kaum tradisional) yang pada waktu itu merupakan pusat pendidikan Islam mengambil sikap anti Belanda. Sampai uang yang diterima seseorang sebagai gaji dari pemerintah Belanda dinilai sebagai uang haram. Celana dan dasi pun dianggap haram karena dianggap sebagai identitas Belanda. Sementara sikap yang ditempuh oleh orang-orang Islam (kaum terpelajar) di luar pesantren (kaum modernis). Mereka justru mengambil sikap proporsional. Tidak antipasti, tetapi juga tidak terlalu dekat

dengan Belanda karena dalam pandangan mereka, umat Islam harus banyak belajar kepada orang Belanda agar pintar dan berwawasan luas, sehingga tidak dibodohi dan dijajah terus menerus. Dengan demikian, terdapat dua sikap yang ditempuh oleh bangsa Indonesia dalam merespon kebijakan Belanda, khususnya yang berkenaan dengan pendidikan, yaitu sikap kooperatif dan nonkooperatif. Menurut Zuhairini yang dikutip oleh Rasi'in dalam Abuddin Nata, mereka mengharamkan kebudayaan yang dibawa oleh Belanda dengan berpegang pada hadits Nabi Muhammad saw. yang artinya: "Barangsiapa yang menyerupai suatu golongan maka ia termasuk golongan tersebut". (HR. Abu Dawud dan Imam Hibban)¹⁰. Mereka juga berpegang pada ayat al-Qur'an suat al-Maidah ayat 51, menyatakan bahwa orang yang beriman tidak dibenarkan menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Allah swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصْرَىٰ أَوْلِيَاءَ (المائدة ٥١)

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu..." (QS. al-Maidah: 51).¹¹

2. Pendidikan Islam pada masa orde lama

Semangat para tokoh pendidikan Islam tidak patah semangat untuk memperjuangkan pendidikan Islam supaya dapat menjadi pendidikan yang legal dan diatur dalam Undang-Undang. Beberapa bulan setelah Indonesia merdeka pemerintah cukup memberi perhatian terhadap pendidikan Islam. yaitu pada tanggal 27 Desember 1945, Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BKPNP) mengadakan pembicaraan mengenai garis besar pendidikan nasional. Hasil pembicaraan tersebut disebutkan oleh Karel A. Steenbrink dalam bukunya Pesantren, Madrasah, Sekolah yang dikutip oleh Syafi'I Ahmadi dalam Abuddin Nata, diusulkan tentang pendidikan agama sebagai berikut:

- a) Pelajaran agama dalam semua sekolah, diberikan pada jam pelajaran sekolah.
- b) Para guru dibayar oleh pemerintah.
- c) Pada sekolah dasar pendidikan agama diberikan mulai kelas VI.
- d) Pendidikan tersebut diselenggarakan seminggu sekali pada jam tertentu.
- e) Para guru diangkat oleh Departemen Agama.
- f) Para guru agama diharuskan juga cakap dalam pendidikan umum.
- g) Pemerintah menyediakan buku untuk pendidikan agama.
- h) Diadakan latihan bagi para guru agama.

¹⁰Ibid..hal 25

¹¹Syaamil, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata, Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia*, (Bandung: Haekal Media Centre, 2009), hlm. 117.

- i) Kualitas pesantren dan madrasah harus diperbaiki.
- j) Pengajaran bahasa Arab tidak dibutuhkan.

Dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1950 terdapat pasal yang mengupas tentang pendidikan dan pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri. Pasal ini terdapat pada Bab XII pasal 20 yang berbunyi: Dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama; orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut. Cara menyelenggarakan pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan bersama-sama dengan Menteri Agama. Sejak keputusan tersebut, terjadi semacam dualisme pendidikan di Indonesia, yaitu pendidikan agama dan pendidikan umum. Di satu pihak Departemen Agama mengelola semua jenis pendidikan agama baik di sekolah-sekolah agama maupun di sekolah-sekolah umum, dan di lain pihak Departemen Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan mengelola pendidikan pada umumnya dan mendapatkan kepercayaan untuk melaksanakan pendidikan nasional. Keadaan seperti ini sempat dipertentangkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak senang dengan adanya pendidikan agama terutama komunis, sehingga ada kesan seakan-akan pendidikan agama khususnya Islam, terpisah dari pendidikan.

Menurut Syafi'I Ahmadi dalam Abuddin Nata dengan mengutip dari Karel A. Steenbrink bahwa perkembangan madrasah sangat terkait dengan peran Departemen Agama. Lembaga inilah yang secara intensif memperjuangkan politik pendidikan Islam di Indonesia. Orientasi usaha Departemen Agama dalam pendidikan agama diajarkan di sekolah-sekolah, di samping pada pengembangan madrasah itu sendiri. Secara spesifik usaha ini ditangani oleh satuan khusus yang mengurus masalah pendidikan agama. Dalam salah satu dokumen disebutkan bahwa tugas bagian pendidikan di lingkungan Departemen Agama itu meliputi: a) Memberi pelajaran agama di sekolah-sekolah negeri dan partikuler, b) Memberi pengetahuan umum di madrasah, dan c) Mengadakan Pendidikan Guru Agama (PGA) dan Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN). Kesempatan tersebut digunakan oleh masyarakat muslim Indonesia untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti yang diungkapkan oleh Prof. H. Mahmud Yunus dalam bukunya *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* yang dikutip oleh Syafi'I Ahmadi dalam Abuddin Nata. Dari data yang dikumpulkan pada tahun 1945 terdapat 13.849 madrasah dan 2.017 murid di Indonesia.

Pada masa Orde Lama ini, perlu diketahui terjadi perkembangan kurikulum sebanyak dua kali, yaitu: a) kurikulum 1947 yang lahir pada masa kemerdekaan,

memakai istilah *leer plan* (Bahasa Belanda), yang artinya rencana pelajaran¹² dan b) kurikulum 1964 yang merupakan penyempurnaan kurikulum 1947 dengan nama Rentjana Pendidikan Sekolah Dasar 1964.¹³ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendidikan di masa Orde Lama merupakan pendidikan yang bersifat sentralistik. Artinya sistem pendidikan diatur oleh pemerintah pusat dan daerah diberi wewenang hanya untuk melaksanakannya (sebelum otonomi daerah).

3. Pendidikan islam pada masa orda baru

Perhatian serius terhadap pendidikan agama dapat diamati setelah kemunculan pemerintah Orde Baru. Dalam pemerintahan ini UU pendidikan nasional yang lebih sempurna memang belum bisa dirumuskan, tetapi kebijakan yang dikembangkan dalam bidang pendidikan cenderung lebih mendasar dan menyeluruh. Ketetapan MPRS No. XXVII/1966 tentang “Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan,” jelas memperlihatkan kecenderungan itu dengan menunjukkan secara kuat peran agama. Pada tahun 1967 Menteri Agama mengeluarkan kebijakan untuk menegerikan sejumlah madrasah dalam semua tingkatan dari tingkat Ibtidaiyah sampai Aliyah. Sejumlah madrasah menjadi negeri dengan rincian, 358 Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), 182 Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) dan 42 Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri (MAAIN). Dengan memberikan status negeri, tanggung jawab pengelolaan menjadi beban pemerintah, tetapi pengaturan dan control atas madrasah-madrasah itu menjadi lebih efektif.

Pada tanggal 10-20 Agustus 1970, dilakukan penyusunan kurikulum madrasah dalam semua tingkatan secara nasional di Cibogo, Bogor, Jawa Barat. Berdasarkan perumusan tersebut menghasilkan Keputusan Menteri Agama No. 52 tahun 1971. Dengan beberapa perbaikan dan penyempurnaan, kurikulum itu kemudian terkenal dengan kurikulum 1973. Dengan tersusunnya kurikulum dan struktur kelembagaan madrasah ini, pengelolaan pendidikan agama di bawah Departemen Agama semakin memperoleh bentuk dan statusnya dengan jelas. Dalam kaitan itu, makna penting dari tersusunnya kurikulum 1973 adalah: (1) ada standar pendidikan bagi madrasah pada setiap jenjang, yang dapat berlaku juga bagi madrasah-madrasah swasta; (2) ada acuan yang lebih detail dalam hal mata pelajaran yang dapat dijadikan dasar-dasar kerja dan pengembangan bagi pendidikan di madrasah; (3) mata pelajaran umum dan kejuruan di madrasah dengan demikian telah mendapatkan landasan formal, apalagi dalam jumlah cukup tinggi melebihi jumlah yang telah dilakukan para pembaharu

¹²Herry Widyastono, *Pengembangan Kurikulum di Era Otonomi Daerah: dari Kurikulum 2004, 2006, ke Kurikulum 2013*, Edit. Said Hamid Hasan, et. al., Cet. 1, Jakarta: Bumi Aksara, 2014, hlm. 55.

¹³*Ibid*, hlm. 56.

pada masa-masa sebelumnya. Pada 18 April 1972 pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 34 tahun 1972 tentang “Tanggung jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan”. Dengan memperhatikan aspirasi tersebut, pemerintah Orde Baru melakukan pembinaan mutu pendidikan madrasah secara terus-menerus. Pada tahun 1975 dikeluarkan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri mengenai “Peningkatan mutu pendidikan madrasah”.

4. Pendidikan Islam Pada Masa Reformasi (Sekarang)

Sejak kekuasaan Orde Baru tumbang pada Mei 1998 kondisi Indonesia dalam keadaan tidak menentu, meskipun upaya pembaharuan sudah sering dilakukan oleh berbagai pihak. Begitu pula sistem pendidikan yang ada dirasakan masih sentralistik, dengan strategi makro yang sulit menyentuh kebutuhan riil masyarakat karena memang mereka tidak dilibatkan. Menurut Pius A. Partanto yang dikutip oleh Junaidi dalam Abuddin Nata, kata reformasi secara etimologi dapat diartikan pembaharuan, perbaikan, dan perubahan. Lanjut Junaidi dengan mengutip dari Mochtar Buchari, reformasi adalah perubahan yang perlu kita lakukan dalam sekolah tanpa mengubah fondasi dan struktur sistem yang ada sekarang ini. Selanjutnya, Junaidi menyimpulkan bahwa reformasi adalah upaya yang mampu mengembalikan otonomi pedagogis pada sekolah dan guru dengan meninjau kembali keseluruhan kebijakan yang ada mengenai hubungan antara birokrasi, pendidikan, sekolah, dan guru. Iklim reformasi harus mampu memposisikan masyarakat dan sekolah (guru) untuk dapat secara bebas mengemukakan ide dan sumbangannya dalam pendidikan. Pada masa reformasi ini ada satu perubahan kurikulum yang masih bersifat sentralistik, yaitu kurikulum 1999. Kurikulum ini merupakan kurikulum 1994 yang disempurnakan yang berbasis kompetensi. Artinya pembelajaran bukan hanya mengembangkan pengetahuan (kognitif) semata-mata, melainkan juga harus mengembangkan keterampilan (psikomotor) dan sikap (afektif). Oleh karena itu disebut dengan istilah Berbasis Kompetensi. Perlu disadari bahwa kebijakan yang diambil terhadap pendidikan seharusnya tidak diintervensi oleh politik dan tekanan pihak manapun. Sehingga kebijakan tersebut dapat menghasilkan sebuah aturan yang berorientasi pada tujuan pendidikan serta melahirkan generasi yang baik.

KESIMPULAN

Lembaga pendidikan Islam adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Perubahan dimaksud tentunya dilandasi oleh nilai-nilai islami. Sedangkan pengaruh politik terhadap manajemen dan lembaga pendidikan Islam sangat berpengaruh terutama dalam pendidikan Islam seperti membangun partai Islam, NU,

Muhammadiyah, dan sebagainya. Politik di dalam manajemen hanya seperti mengatur kelembagaan menjadi benar. Dilihat dari perspektif politik pendidikan bahwa Pendidikan dapat memengaruhi politik dan politik dapat tersosialisasi melalui pendidikan. Hal ini dibuktikan dalam perubahan dan perkembangan pendidikan Islam dalam peta politik pendidikan Islam yang mengalami dinamika berdasarkan tingkat kepentingan para pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan negara dalam sistem pendidikan nasional. Oleh karena umat Islam perlu memahami politik pendidikan agar Umat Islam di Indonesia terutama aktivis politik Islam dapat memperjuangkan kebutuhan dan kepentingan pendidikan Islam. Tujuan diperjuangkannya pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional adalah untuk memiliki sisi persamaan dan setara antara pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Nasional dengan pendidikan Islam yang dikelola oleh Kementerian Agama dalam sistem pendidikan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Saleh Abdullah, *Teori-teori Pendidikan Berdasarkan Al Qur'an* Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Chabib Thoha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Fathiyah Hasan Sulaiman, *Sistem Pendidikan Versi Al Ghazaly*. Bandung: PT. Al Ma'arif, 2000.
- Herry Widayastono, *Pengembangan Kurikulum di Era Otonomi Daerah: dari Kurikulum, 2004) 2006, ke Kurikulum 2013*, Edit. Said Hamid Hasan, et. al., Cet. 1, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- <https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/pengertian-manajemen/> diakses pada tanggal 19 maret 2019.
- Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia, 2002.
- Sidik, Firman. "Pendidikan Humanis dan Implikasinya Dalam Pembelajaran." *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4.1 (2016): 88-95.
- Syaamil, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata, Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia*. Bandung: Haekal Media Centr, 2009.
- Syafaruddin. *Manajemen lembaga pendidikan Islam*. Ciputat: Penerbit Ciputat press. 2005.